



LAPORAN KINERJA BAKORWIL I MADIUN TAHUN 2023



www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id

**Laporan Kinerja Bakorwil I
Madiun Tahun 2023 menyajikan
hasil pengukuran kinerja terhadap
realisasi dari target Indikator
Kinerja Bakorwil I Madiun yang
telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2023. Segenap
kemampuan, gagasan dan upaya
terbaik telah dicurahkan dalam
menjalankan tugas dan fungsi
masing-masing dengan hasil
kinerja seperti yang tertuang**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata, Laporan Kinerja (LKj) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) Bakorwil I Madiun ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja atas upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Laporan Kinerja ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Tahun 2023 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2023 yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Segenap kemampuan, gagasan dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan hasil kinerja seperti yang tertuang dalam laporan ini.

Dengan disusunnya LKj Bakowil I Madiun Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal, dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja Bakorwil I Madiun.



Madiun, 31 Desember 2023

E. HERO WAHONO SANTOSO, S.Sos, M.M.

NIP. 19670221 198809 1 001

Pembina Utama Muda

DAFTAR

ISI

| | |
|--|---|
| PEMBUKA | KATA PENGANTAR..... i |
| | DAFTAR ISIii |
| | RINGKASAN EKSEKUTIF..... iii |
| BAB I PENDAHULUAN | BAB I PENDAHULUAN 1 |
| | A. Latar Belakang 1 |
| | B. Struktur Organisasi 2 |
| | C. Tugas Pokok dan Fungsi..... 3 |
| | D. Wilayah Kerja 4 |
| | E. Isu Strategis 4 |
| | F. Cascading Kinerja..... 4 |
| | G. Peta Proses Bisnis 7 |
| | H. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi 9 |
| | I. Sistematika Penyajian 11 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | BAB II PERENCANAAN KINERJA 12 |
| | A. Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 12 |
| | B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... 13 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 15 |
| | A. Capaian Kinerja 15 |
| | B. Realisasi Anggaran 36 |
| | C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi..... 37 |
| PENUTUP | BAB IV PENUTUP 38 |
| | A. Kesimpulan 38 |
| | B. Langkah yang akan dilakukan 38 |

LAMPIRAN:

1. Form Pendanaan Indikatif Renstra 2019-2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Rekapitulasi Data
4. Cascading Kinerja
5. Peta Proses Bisnis

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum, capaian kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2023 dinyatakan “berhasil”. Pertama, SAKIP Bakorwil I Madiun mendapatkan predikat A (memuaskan) dengan nilai 87,69 , yang kedua, persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 96,00%

Bakorwil diberikan tugas untuk membantu Gubernur melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, kedudukan Bakorwil menjadi penting untuk mendorong keberhasilan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah kerjanya masing-masing.

Secara umum, capaian kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2023 dinyatakan “berhasil”. Pertama, SAKIP Bakorwil I Madiun mendapatkan predikat A (memuaskan) dengan nilai 87,69, dan yang kedua, persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti mencapai 100%, sesuai yang telah ditargetkan dalam perjanjian kinerja. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2023 cukup tinggi, yaitu sebesar 96,00%

Ke depan untuk mencapai sasaran Bakorwil I Madiun, maka diperlukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi maupun pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja yang harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah khususnya pemerintah kabupaten/kota.

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja ini disusun sebagai laporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja selama tahun 2023 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Bakorwil I Madiun, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Bakorwil I Madiun

A. Latar Belakang

Mengingat kondisi geografis Jawa Timur dan jangkauan rentang kendali cakupan wilayah 38 kabupaten/kota yang sangat luas, maka perlu dibentuk Bakorwil untuk membantu Gubernur melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah kabupaten/kota. Bakorwil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan hal tersebut, peran Bakorwil sangat strategis dalam mewujudkan

visi Provinsi Jawa Timur yaitu **“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”** maka di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, Bakorwil fokus dalam misi ke-3 yaitu **Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.**

Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2016.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bakorwil I Madiun selengkapya diilustrasikan sebagaimana bagan berikut ini:



C. Tugas Pokok dan Fungsi



Membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bakorwil menyelenggarakan fungsi:



Perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya



Pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan antar pemerintah kabupaten/kota



Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan



Pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur



Monitoring, evaluasi, dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan



Pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK)



Pemberdayaan dan fasilitasi pemerintah kabupaten/kota



Optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah kabupaten/kota



Penyelarasan perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota



Dukungan teknis dan pengembangan potensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

D. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Bakorwil I Madiun meliputi 8 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu:



E. Isu Strategis

Permasalahan utama dan isu strategis di wilayah kerja Bakorwil I Madiun adalah belum optimalnya koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah kabupaten/kota. Oleh sebab itu, diperlukan peran strategis Bakorwil yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

F. Cascading Kinerja

Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024 telah menetapkan visinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu **Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif**

melalui kerja bersama dan semangat gotong royong. Oleh karena itu, Bakorwil se-Jawa Timur selaku perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di daerah mempunyai kebijakan, program dan kegiatan yang disusun untuk turut mendorong terwujudnya visi dan misi tersebut. Adapun sasaran yang menjadi ruang lingkup Bakorwil se-Jawa Timur adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya, dengan fokus **misi ke-3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.**

Tabel Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---|---|--|---|
| Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun | 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun | Peningkatan akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun |
| | 2. Meningkatnya hasil koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun | Meningkatkan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan | Peningkatan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan |

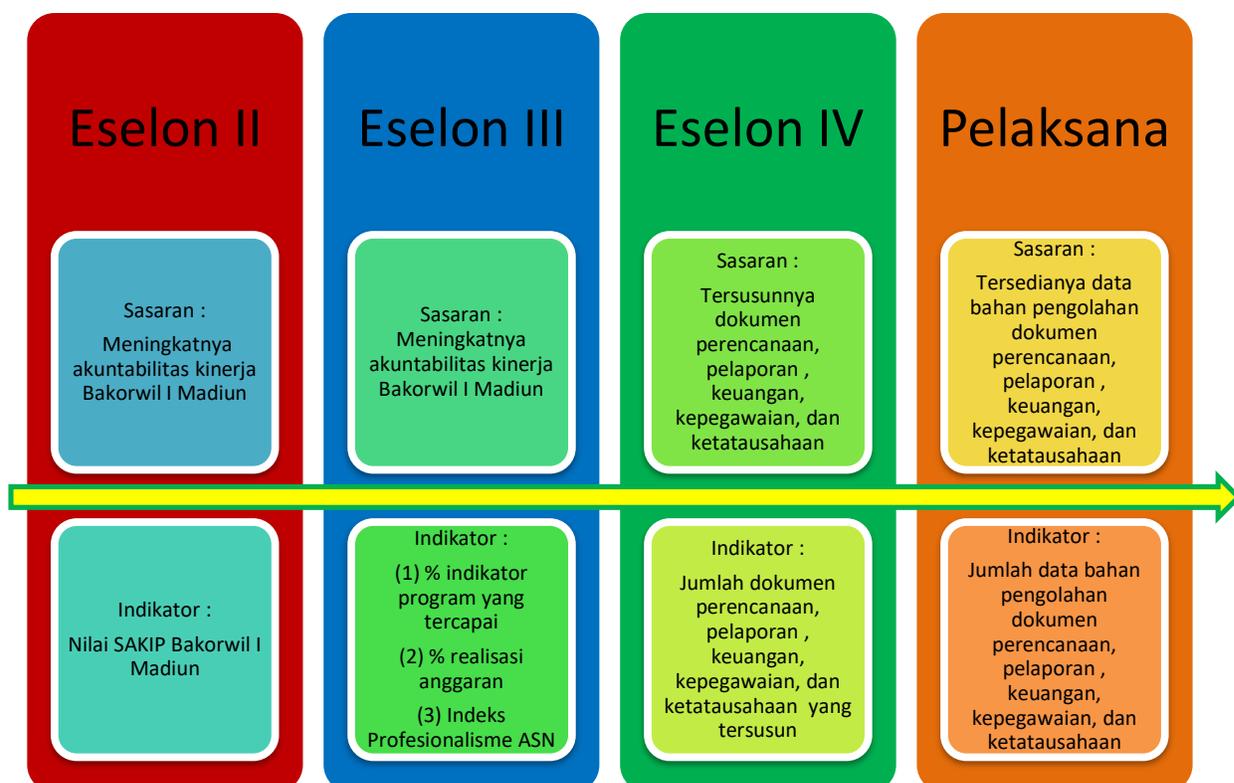
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka cascading/pohon kinerja Bakorwil I Madiun dapat digambarkan sebagai berikut:

SASARAN 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun

INDIKATOR :

Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun

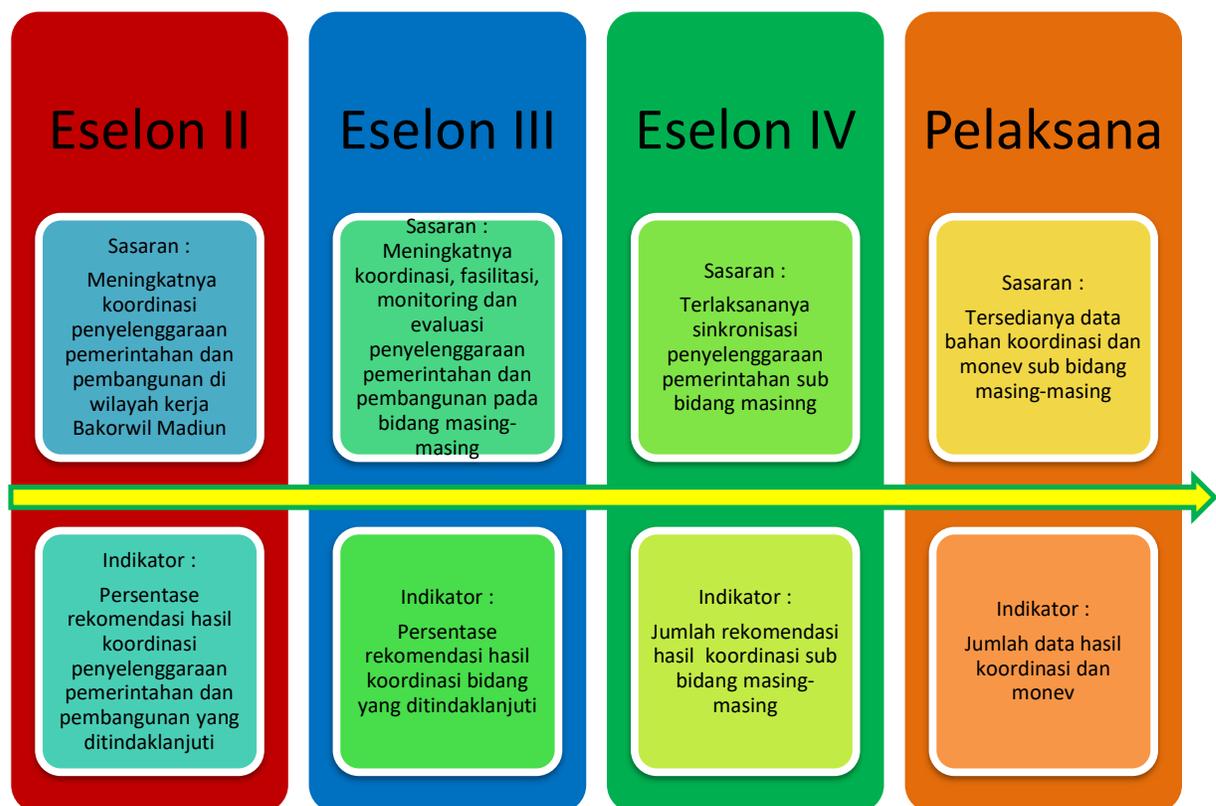


SASARAN 2 :

Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun

INDIKATOR :

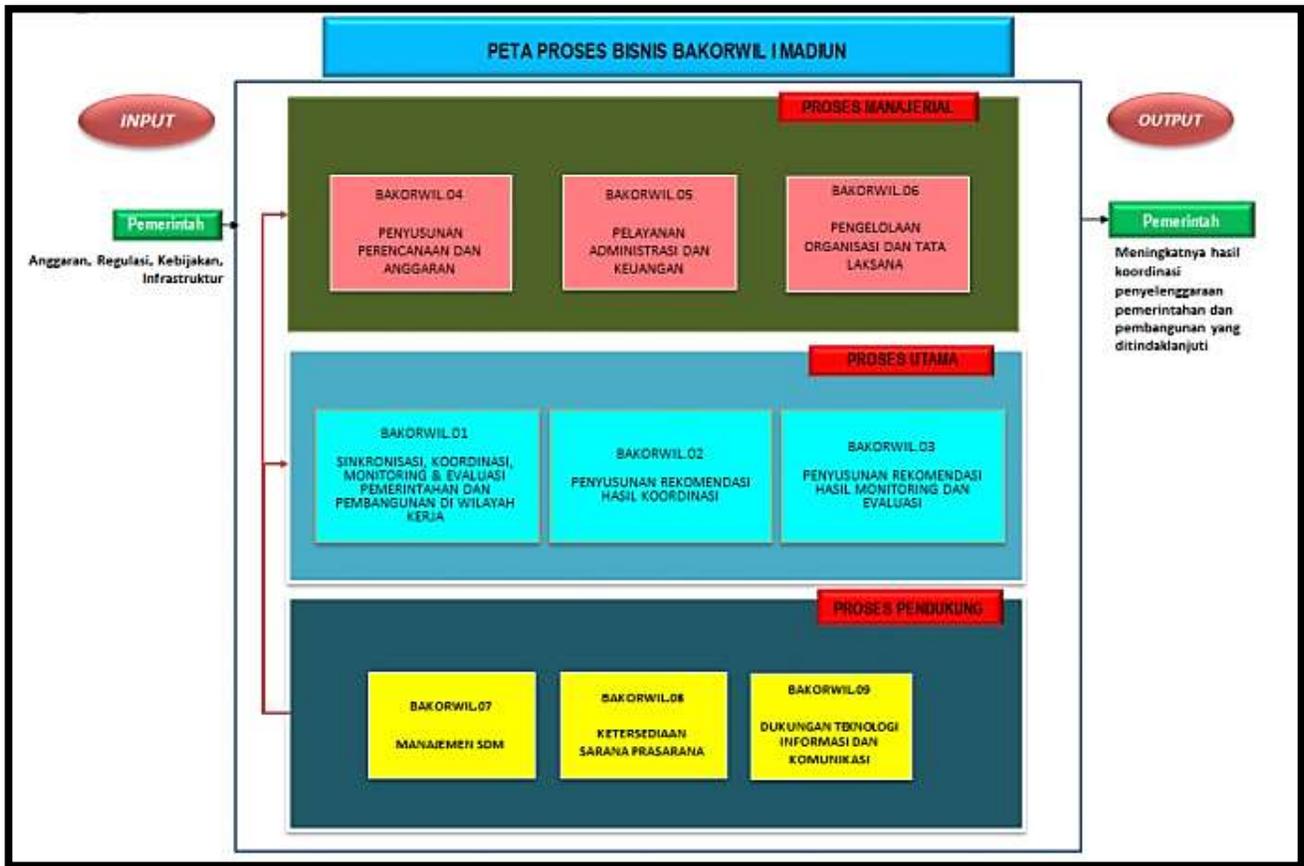
Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti



G. Peta Proses Bisnis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bakorwil, maka yang menjadi proses bisnis utamanya adalah melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di wilayah kerjanya serta penyusunan rekomendasi hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sedangkan proses lain yang terkait perencanaan, tata kelola organisasi, administrasi dan keuangan merupakan proses manajerial di Bakorwil. Selain itu, yang menjadi

proses pendukungnya adalah manajemen SDM aparatur, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi.



Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/730/KPTS/013/2017 tentang Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bakorwil I Madiun telah memiliki 22 SOP yang terkait dengan kegiatan kesekretariatan hingga kegiatan koordinasi dan money masing-masing bidang.

H. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 20 November 2023, Nomor: 000.8.6.3/44242/031.2/2023 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bakorwil I Madiun Tahun 2023, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Bakorwil I Madiun memperoleh nilai 87,69 atau predikat A (Memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Bakorwil I Madiun menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

| No. | Komponen | Bobot | Nilai 2022 |
|--------------------------------------|---|-------|--------------------------|
| a | Perencanaan Kinerja | 30% | 23,94 |
| b | Pengukuran Kinerja | 30% | 27,83 |
| c | Pelaporan Kinerja | 15% | 11,46 |
| d | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | 17,59 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100% | 80,83 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | A (Memuaskan) |

**Dasar : PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021*

| No. | Komponen | Bobot | Nilai 2023 |
|--------------------------------------|---|-------|--------------------------|
| a | Perencanaan Kinerja | 30% | 29,81 |
| b | Pengukuran Kinerja | 30% | 25,11 |
| c | Pelaporan Kinerja | 15% | 12,77 |
| d | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | 20 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100% | 87,69 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | A (Memuaskan) |

**Dasar : PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021*

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja, Tim Evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen kinerja internal agar senantiasa melakukan upaya inovasi sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan pada lingkungan Bakorwil I Madiun;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan melakukan penyelarasan antar dokumen perencanaan yang berpedoman pada Perubahan RPJMD 2019-2024;
3. Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
4. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan pengembangan Teknologi Informasi (aplikasi) pada seluruh unit kerja;
5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja;

6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja yang berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Bakorwil I Madiun.

I. Sistematika Penyajian

| | |
|----------------|--|
| Bab I | PENDAHULUAN , menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, wilayah kerja, isu strategis, cascading kinerja, peta proses bisnis, ringkasan Laporan Hasil Evaluasi, dan sistematika penyajian |
| Bab II | PERENCANAAN KINERJA , menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bakorwil I Madiun Tahun 2023 meliputi Rencana Strategis Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 |
| Bab III | AKUNTABILITAS KINERJA , menjelaskan pengukuran tingkat pencapaian kinerja Bakorwil I Madiun, hasil pengukuran kinerja, perbandingan dengan target Renstra, analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusinya, analisa efisiensi sumber daya, akuntabilitas keuangan, dan tindak lanjut hasil evaluasi |
| Bab IV | PENUTUP , menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Bakorwil I Madiun Tahun 2023 serta rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang |

BAB II

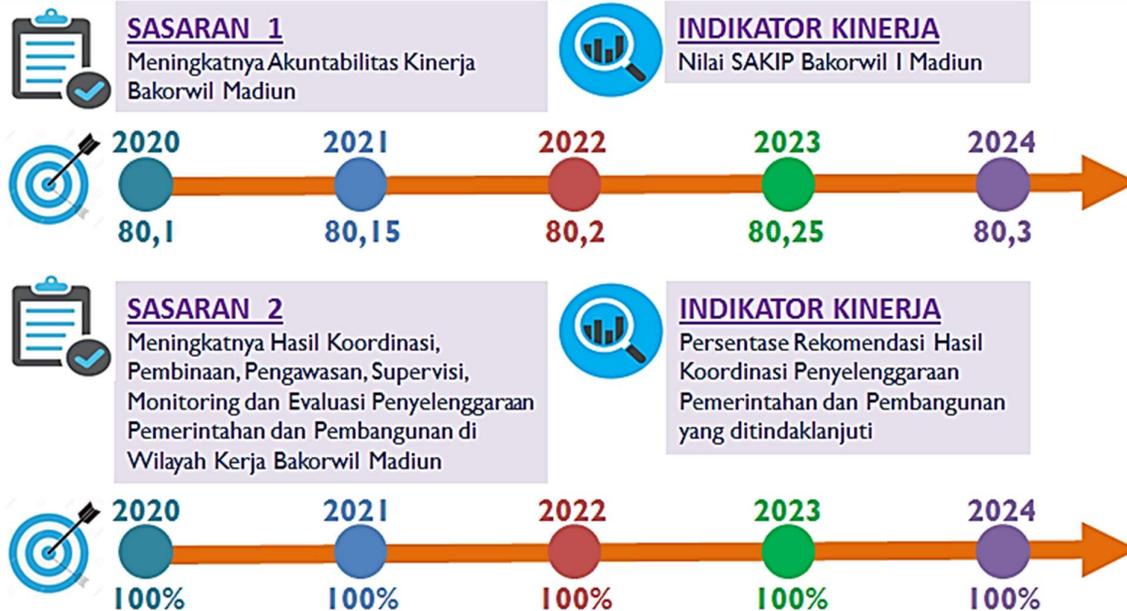
PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024

Rencana Strategis (Renstra) Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Bakorwil I Madiun yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

| TUJUAN | SASARAN | |
|---|--|---|
| | Uraian | Indikator |
| Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun | 1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun | Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun |
| | 2.Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti |

TARGET KINERJA 2020-2024



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Bakorwil I Madiun Tahun 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target capaiannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 |
|----|---|---|--------------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun | Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun | 80,25 |
| 2 | Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti | 100% |

Berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2023 yang ingin dicapai, maka disusunlah program dalam rangka mendukung

suksesnya pencapaian kinerja Bakorwil I Madiun. Program tahun 2023 yang dimaksud adalah sebagai berikut :

| NO | PROGRAM | PAGU |
|-----------|--|-----------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 16.684.815.000 |
| 2 | Program Pelayanan Penghubung | 700.000.000 |
| | JUMLAH | 17.384.815.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|---|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun | Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun | 80,25 | 87,69 | 109,27 |
| 2 | Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| | | Formula : % = $\frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah rekomendasi}}$ = $\frac{16}{16}$ = 100% | | | |

Indikator Kinerja 1 : Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, diketahui bahwa realisasi nilai SAKIP Bakorwil I Madiun tahun 2023 adalah 87,69, sedangkan target nilai SAKIP yang ingin dicapai adalah 80,25 , sehingga capaian kinerjanya 109,27%. Dalam hasil evaluasi SAKIP oleh Tim SAKIP Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa ada peningkatan nilai di komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan sedikit penurunan nilai di komponen pelaporan kinerja, sehingga perlu adanya upaya untuk memperbaiki komponen pelaporan kinerja dengan memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, pengukuran, dan reviu kinerja internal secara berkala dan berjenjang serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan mekanisme tersebut.

Indikator Kinerja 2 : Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, diketahui bahwa realisasi persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 100%, sedangkan target yang ingin dicapai adalah 100%, sehingga capaian kinerjanya terpenuhi 100%. Rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti sudah tercapai sebesar 100% dari target 16 koordinasi yang ditindaklanjuti.

Adapun hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti sebanyak 16 (enam belas) koordinasi sebagai berikut:

| NO | KOORDINASI | TINDAK LANJUT REKOMENDASI |
|-----------|--|---|
| 1. | Silaturahmi Forkopimda Kota Madiun dan Kabupaten Madiun Bersama Paguyuban Pencak Silat di Bakorwil I Madiun yang | Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 21 Februari 2023 Nomor : 100/060.1/211.2/2023 kepada Walikota Madiun, Bupati Madiun, Bupati Magetan, Bupati Ngawi dan Bupati Ponorogo sebagai berikut: |

dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023 bertempat di Rumah Dinas Jabatan Kepala Bakorwil I Madiun

1. Kesepakatan Bersama (KSB) perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai bidang dan sektor prioritas kebutuhan daerah yang dikerjasamakan antar Organisasi Perangkat Daerah terkait Kabupaten/Kota;
2. Dalam pelaksanaan Kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga perlu dukungan regulasi dan komitmen para pihak, program kerja, anggaran, sarana prasarana, SDM yang berkompeten, relasi dan partisipasi antara dinas/instansi/lembaga dan masyarakat;
3. Segera Dilakukan pembentukan Sekretariat Bersama Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan;
4. Perlu adanya peningkatan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, fasilitasi dan monitoring dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah dengan melibatkan dinas/instansi/lembaga terkait;

2. Rapat koordinasi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis dilaksanakan pada tanggal



Surat Kepala Bakorwil I Madiun kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Mei 2023 Nomor : 045/181.1/211.2/2023 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis pada Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun sebagai berikut :

- a. Agar meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergi antara lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota dengan perangkat daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis melalui pembinaan dan pengawasan kearsipan untuk mewujudkan tertib administrasi arsip.
- b. Optimalisasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam pengelolaan arsip yang merupakan himbauan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

| | | |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c. Lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota agar mempersiapkan data dan informasi ketersediaan arsip statis yang ada di pemerintah daerah guna pendataan arsip statis nasional yang akan dilaksanakan oleh ANRI dalam waktu dekat ini. d. Penting dan perlunya kepedulian dan komitmen pimpinan, dukungan SDM dan sarana prasarana serta anggaran yang memadai guna terciptanya proses manajemen kearsipan yang baik dan ideal pada kabupaten/kota se Bakorwil I Madiun. |
| 3. | <p>Koordinasi dan Monitoring Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Sosial</p>  | <p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 6 September 2023 Nomor : 300/354.1/211.2/2023 perihal Laporan Hasil Koordinasi dan Monitoring Konflik Sosial pada Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi konflik sosial pada kabupaten/kota se Bakorwil I Madiun dapat dikendalikan dan diminimalisir dengan baik sehingga konflik sosial yang terjadi tidak signifikan. 2. Potensi konflik sosial secara umum di wilayah Bakorwil I Madiun diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> a. Keberadaan perguruan pencak silat merupakan potensi konflik baik antar perguruan pencak silat dan tugu perguruan pencak silat yang berada difasilitas umum negara dan pribadi. Dengan budaya dan kultur diwilayah Bakorwil I Madiun maka tingkatkan koordinasi silaturahmi dengan pemuka perguruan pencak silat, guna meningkatkan generasi yang berilmu dan berakhlak. Sehingga dapat membawa nama baik dari setiap perguruan pencak silat. Kolaborasi dan sinergi antar dinas terkait dalam meningkatkan education bagi kelompok perguruan pencak silat sehingga dapat membawa citra perguruan yang sehat dan bermartabat. b. Himbauan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur terkait dengan pembongkaran tugu perguruan |

pencak silat terjadi pro dan kontra. Namun sebagian di wilayah Bakorwil I Madiun telah melaksanakan pembongkaran yang dikarenakan perbaikan jalan dan kesadaran bagi anggota perguruan pencak silat dan masyarakat.

c. Sebagian besar Bakesbangpol Kabupaten/Kota telah menginventarisasi jumlah tugu perguruan pencak silat yang berada diwilayahnya baik yang berada di fasilitas umum negara dan pribadi.

3. Fasilitas, silaturahmi baik perorangan/lembaga/perusahaan dan masyarakat yang berpotensi konflik guna meminimalisir konflik sosial.

4. Pencegahan dan penganggulangan konflik sosial dapat dilaksanakan dengan Koordinasi dan sinergi dengan dinas/instansi/lembaga dan memerankan Tim Terpadu Pemantauan Konflik sosial, FKDM, FKUB, peran 3 pilar di Desa dan Kelurahan dengan mengikut sertakan Toga dan Tomas sehingga potensi konflik dapat di deteksi dan cegah dini untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan aman. Dalam pemulihan konflik sosial adanya langkah kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi guna menstabilkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Koordinasi dan Monitoring Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal



Surat Kepala Bakorwil I Madiun Kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 9 November 2023 Nomor : 270/507/211.2/2023 perihal Laporan Hasil Koordinasi dan Monitoring Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kerja Bakorwil I Madiun sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan, berjalan dengan baik dan lancar;

2. Penyiapan badan adhoc penyelenggara pemilu yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, dan



Satlinmas telah berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota;

3. Koordinasi dengan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 selama masa pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD berjalan dengan baik dan lancar;
4. Penetapan DPT maupun penyiapan DPTb dan jumlah TPS telah dilaksanakan dengan baik;
5. KPU Kabupaten/Kota telah melakukan sosialisasi kepada peserta Pemilu dan calon pemilih secara online maupun offline di beberapa tempat seperti sekolah, pondok pesantren, kecamatan/kelurahan/desa, dan tempat umum lainnya;
6. Gudang penyimpanan logistik pemilu telah disiapkan dengan menggunakan gudang milik Bulog, pemerintah daerah, maupun swasta dan dilengkapi dengan perangkat keamanan yang memadai;
7. KPU Kabupaten/Kota bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan jadwal kampanye, pembentukan Satlinmas, dan mitigasi daerah rawan bencana;
8. KPU Kabupaten/Kota berharap agar koordinasi dan kerjasama dengan Bakorwil I Madiun dan pemerintah daerah dapat terus berjalan dengan baik guna menyukseskan pelaksanaan Pemilu di tahun 2024;

5. Koordinasi dan Monitoring Ketersediaan dan Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

1. Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 04 April 2023 Nomor : 510/121/211.3/2023 Kepada Ibu Gubernur Jawa Timur melalui Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur perihal : Laporan Hasil Koordinasi dan Monitoring Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok menjelang Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023;
2. Ketersediaan barang kebutuhan pokok pada Kabupaten/Kota di Wilayah bakorwil I Madiun



masih aman dan tercukupi sampai dengan menjelang Hari raya Idul Fitri Tahun 2023 ;

3. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 harga barang kebutuhan pokok di Wilayah Bakorwil I Madiun relative stabil, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan namun masih dalam batas wajar / normal bahkan ada juga yang mengalami penurunan harga ;
4. Distribusi dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 pada pada Kabupaten/Kota di Wilayah Bakorwil I Madiun aman dan lancar ;
5. Untuk menjaga keadaan tetap aman dan kondusif, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten/Kota Bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan saling berkoordinasi terkait kesediaan, pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok menjelang Hari raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023.

6. Koordinasi dan Monitoring Hewan Qurban Menghadapi Hari Raya Idul Adha 1444 H Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 14 Juni sampai dengan 26 Juni 2023.

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 27 Juni 2023 Nomor : 524/243/211.3/2023 kepada Ibu Gubernur Jawa Timur melalui Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur perihal Hasil Koordinasi dan Monitoring Hewan Qurban Menghadapi Hari Raya Idul Adha 1444 H Tahun 2023 se Bakorwil I Madiun :



Menghadapi Hari Raya Idul Adha 1444 H Tahun 2023, Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun telah mengantisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku (PMK) dan Lumphy Skin Disease (LSD) pada ternak ;



1. Jumlah ternak sapi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Bakorwil I Madiun yang terdeteksi penyakit Kuku dan Mulut (PMK) dan Lumphy Skin Disease (LSD) terus mengalami penurunan, bahkan di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tulungagung dan Kota Kediri ternak sapi sudah terbebas dari penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ;



2. Dalam penanganan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) serta Lumphy Skin Disease (LSD), Kabupaten/Kota se Wilayah Bakorwil I Madiun telah melakukan beberapa langkah pencegahan, antara lain :
3. Melakukan monitoring/pemantauan lalu lintas hewan qurban ke pasar hewan dan peternak/penjual untuk mengetahui Kesehatan calon hewan qurban
4. Memberikan pengobatan simtomatis (AB, Analgesik, Antipiretik, Multivitamin, dan anti paratise) terhadap hewan yang terjangkit serta untuk tidak dilalulintaskan dan memberikan obat semprot untuk luka yang terbuka
5. Memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat agar melaporkan pada Dinas Peternakan bilamana ternaknya terjangkit PMK dan atau LSD
6. Dinas Peternakan Kabupaten/Kota bersama Instansi terkait lainnya saling berkoordinasi untuk penanganan pencegahan dan pengobatan virus PMK maupun LSD ;
7. Pelaksanaan kegiatan monitoring lalu lintas dan pemeriksaan calon hewan qurban sudah sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

7. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut East Java Investment Challenge Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023



Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 23 Agustus 2023 Nomor : 582/331/211.3/2023 kepada Ibu Gubernur Jawa Timur melalui Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur perihal Laporan hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut East Java Investment Challenge Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun Tahun 2023 di Bakorwil I Madiun Tahun 2023 :

1. Mendorong Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun untuk mengikuti Kompetisi Investment Challenge guna menggali potensi investasi pada Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun untuk memperoleh daftar proyek investasi yang clear and clean serta bertehnologi ramah lingkungan



mendekati I - PRO yang telah dievaluasi aspek kinerjanya ;

2. Proyek investasi memiliki multiplier effect untuk keuntungan daerah, selaras dengan program prioritas kepala daerah dan pentingnya identifikasi kemungkinan resiko berdampak negatif ;
3. Investment Challenge menjangkir proyek dan lebih ke komitmen kepala daerah dan inisiasi dari proyek yang berpotensi untuk meningkatkan value potensi daerah ;
4. Dari 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota yang ada di wilayah Bakorwil I Madiun, terdapat 8 (delapan) Kabupaten / Kota yang sudah terkonfirmasi yaitu:
 - a. Kabupaten Magetan
 - b. Kabupaten Pacitan
 - c. Kabupaten Kediri
 - d. Kota Kediri
 - e. Kabupaten Madiun
 - f. Kabupaten Trenggalek
 - g. Kabupaten Ponorogo
 - h. Kabupaten Ngawi

8. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Klinik Konsultasi hak Merek di Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023.



Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 23 Oktober 2023 Nomor : 518/460.2/211.3/2023 kepada Ibu Gubernur Jawa Timur perihal Laporan Hasil Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Klinik Konsultasi hak Merek di Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun Tahun 2023 :

1. Pelaksanaan Klinik Konsultasi hak Merek di Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun mayoritas belum memiliki ruangan khusus pelayanan klinik konsultasi hak Merek, tetapi sudah melaksanakan fasilitasi permohonan Hak Merek dengan menggunakan anggaran APBD melalui dinas terkait ;
2. Pendaftaran hak merek kurang dipahami oleh Sebagian besar pelaku UMKM/IKM di Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun, beberapa anggapan bahwa perlindungan hak merek tidak berdampak secara signifikan, membutuhkan

biaya besar, memerlukan proses yang panjang, dan identifikasi terhadap pendaftaran merek yang rumit, serta keterbatasan informasi tentang tata cara pendaftaran hak merek yang rumit, serta keterbatasan informasi tentang tata cara pendaftaran hak merek yang membuat pelaku UMKM kurang peduli dan tanggap untuk mendaftarkan hak merek, diharapkan Pemerintah Daerah terus mendorong , memfasilitasi, mengembangkan UMKM/IKM untuk memiliki kesadaran mendaftarkan hak merek agar produknya mempunyai legalitas secara hukum ;

3. Pemerintah daerah diharapkan memberikan pelayanan kepada pelaku UMKM/IKM berupa klinik konsultasi hak merek, dengan dukungan anggaran serta tenaga profesional di lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Koordinasi dan Monitoring Program Adiwiyata di Kabupaten/Kota se wilayah Bakorwil I Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari s.d 3 Maret 2023



Surat Kepala Bakorwil I Madiun kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Maret 2023 nomor : 660 / 111 / 211.5 / 2023 perihal Hasil Koordinasi dan Monitoring Program ADIWIYATA di Kabupaten/Kota Se Bakorwil I Madiun Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Perlu adanya pemahaman tentang pendidikan lingkungan hidup kepada warga sekolah (siswa, guru, pegawai dan komite) serta masyarakat di sekitarnya tentang upaya pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Menumbuhkan kesadaran sejak dini akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan kepada peserta didik (siswa) dan warga sekolah lainnya dalam upaya meningkatkan nilai-nilai dan rasa kepedulian pada pelestarian lingkungan hidup di tengah masyarakat;
3. c. Perlunya sinergitas program ADIWIYATA antar dinas/instansi (Dinas Lingkungan Hidup Kab./Kota, Dinas Pendidikan Kab./Kota serta Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur)

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>dalam rangka mendorong dan memberikan pemahaman tentang ADIWIYATA di lingkungan sekolah dalam rangka menumbuhkan kesadaran dini akan pentingnya kelestarian lingkungan.</p> |
| 10. | <p>Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Jalan Lintas Selatan di wilayah Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung yang dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Mei 2023</p> | <p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun kepada Bupati Trenggalek tanggal 29 Mei 2023 nomor 600/032.1/211.5/2023 perihal Rekomendasi hasil Tinjauan Lapangan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Lintas Selatan yang melintasi di kabupaten Tulungagung telah dikerjakan diharapkan dalam Tahun ini selesai adapun Jalan Lintas selatan di Kabupaten Trengalek mengalami kendala. Pembebasan Tanah keterbatasan Anggran baik di Kabupaten Trengalek maupun Propinsi. 2. Untuk mengurai permasalahan tersebut diatas perlunya diadakan rapat yang mempertemukan Kabupaten Trengalek , Propinsi dan Kementerian PUPR9 balai VII). 3. Bakorwil Madiun siap untuk memfasilitasi dengan harapan Permasalah Jalan lintas Selatan Di Kabupaten Trengalek cepat terselesaikan. |
| 11. | <p>Koordinasi dan Monitoring Penanganan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Kabupaten/Kota se wilayah Bakorwil I Madiun dilaksanakan pada 22 Mei s/d 7 Juni 2023</p> | <p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun kepada Bupati/Walikota se Bakorwil I Madiun tanggal 15 Juni 2023 nomor 660 / 220 / 211.5 / 2023 perihal Hasil Koordinasi dan monitoring penanganan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) pada Kabupaten/Kota Se Bakorwil I Madiun Tahun 2023 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya pemahaman tentang peraturan yang mengatur penanganan limbah B3 kepada para pelaku usaha dan individu untuk membuang limbah B3 yang tepat. 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota perlu melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 baik menyangkut permasalahan perijinan maupun penanganan limbah B3; |



| | | |
|------------|--|---|
| | | <p>3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota perlu melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 terkait dengan penyimpanannya maupun pembuangannya.</p> |
| <p>12.</p> | <p>Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka Optimalisasi dan Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah Bakorwil I Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2023</p> | <p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun kepada sebagaimana terlampir tanggal 21 September 2023 nomor 600/399.3/211.5/2023 Perihal rekomendasi hasil rapat koordinasi pengelolaan barang milik daerah dalam rangka optimalisasi dan pengamanan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah Bakorwil I Madiun sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya pengamanan aset dari segi fisik, administratif dan hukum oleh seluruh penanggungjawab dan pejabat pengurus barang aset untuk menghindari/mencegah permasalahan di masa yang akan datang 2. Perlu dilakukannya inventarisasi permasalahan aset bagi UPT/Cabang Dinas/Rumah Sakit yang asetnya bermasalah dan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya penyelesaian permasalahan aset 3. Diharapkan seluruh penanggungjawab dan pejabat pengurus barang aset dapat mencegah terjadinya permasalahan baru dan dapat terus mengupayakan penyelesaian permasalahan yang ada. |
| <p>13.</p> | <p>FGD Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Wilayah Bakorwil I Madiun</p>  | <p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun Kepada Bupati/Walikota se Bakorwil I Madiun, Nomor : 440/194/211.4/2023 tanggal 30 Mei 2023 Perihal Rekomendasi Hasil FGD Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Bakorwil I Madiun sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya pendampingan dari Dinas terkait pada saat enumerator SSGI melakukan survey; b. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam persiapan survey SSGI (Bappeda sebagai leader) c. Berkoordinasi dengan pihak terkait (Kemenkes) untuk mendapatkan kisi-kisi instrumen SSGI . |



- d. Mensosialisasikan/mengedukasikan program stunting melalui media sosial atau panggung hiburan rakyat.
- e. Meningkatkan koordinasi, pengawasan dan pendampingan pelaksanaan aksi konvergensi program PPS secara multisektoral.
- f. Memasukkan kebijakan pencegahan stunting pada masing-masing layanan di lini lapangan (misalnya surat bebas animea menjadi persyaratan masuk sekolah SMP dan SMA dan persyaratan perkawinan)

14. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



Surat Kepala Bakorwil I Madiun Kepada Bupati/Walikota se Bakorwil I Madiun Nomor : 440/594/211.4/2023 tanggal 7 Desember 2023 perihal Rekomendasi hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai berikut :

- a. Data yang digunakan sebagai penentuan penerimaan bantuan, pada tahun 2024 adalah data P3KE yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi serta telah di update pada dashboard dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri).
- b. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di
- c. Kabupaten/Kota diarahkan pada perbaikan data sehingga seluruh kebijakan pemberian bantuan dapat sesuai sasaran
- d. kabupaten/Kota yang belum melakukan verifikasi/validasi data P3KE
- e. untuk melakukan verifikasi/validasi dan dan menetapkan data pensasar
- f. P3KE dan segera di update pada dashboard dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri).
- g. Kabupaten/Kota yang belum melengkapi dokumen-dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) agar segera dilengkapi karena sebagai arah perencanaan percepatan kemiskinan ekstrem.

| | | |
|------------|---|--|
| | | <p>h. Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan aplikasi Sistem Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (SINTA GELIS) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta aplikasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) sebagai dasar pengolahan data analisa kemiskinan di masing-masing wilayah hingga.</p> |
| <p>15.</p> | <p>Koordinasi pencegahan kekerasan perempuan serta anak dan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun Tahun 2023</p>   | <p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor: 353/110/211.3/2023 Tanggal 27 Maret 2023 Perihal Rekomendasi Koordinasi pencegahan kekerasan perempuan serta anak dan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun Tahun 2023 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Akses wifi gratis bebas diakses perlu untuk sterilkan dari konten kekerasan dan pornografi dan fasilitas online. Shelter atau rumah singgah untuk disediakan baik untuk korban dan pelaku anak. Sinergitas lintas sektoral pengampu dalam rangka menekan meningkatnya kekerasan perempuan serta anak dan pencegahan perkawinan anak perlu untuk di tingkatkan. Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan akademisi secara aktif. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan dan mitigasi meningkatnya kekerasan perempuan serta anak dan pencegahan perkawinan anak. |
| <p>16.</p> | <p>Koordinasi dan Monitoring perkembangan Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun Tahun 2023</p>  | <p>Surat Kepala Bakorwil I Madiun Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 430/38/211.4/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Perihal rekomendasi hasil Koordinasi dan Monitoring perkembangan Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun Tahun 2023 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun, mengharapkan sebelum penerbitkan izin usaha pariwisata lewat Online Single Submission (OSS) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diminta untuk memberikan |



- rekomendasi agar usaha tersebut memenuhi kelayakan usaha pariwisata yg telah ditetapkan.
- b. Diperlukan pembinaan secara berkelanjutan agar usaha pariwisata semakin berkembang dan memenuhi standar mutu dalam melayani kunjungan wisatawan.
 - c. Dengan sistem Online Single Submission (OSS) dalam pengurusan ijin usaha pariwisata, disatu sisi mempercepat pelayanan namun disisi yg lain kelayakan usaha masih kurang sesuai dengan Kemenparekraf No 4 Tahun 2021.
 - d. Kabupaten/Kota mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi agar memberikan pelatihan untuk pemantapan sumber daya manusia (SDM) pariwisata serta pelatihan untuk manajemen pariwisata bagi pengelola.
 - e. Dengan jumlah usaha pariwisata yg sangat banyak dan belum diverifikasi karena keterbatasan petugas, Bakorwil siap jika diminta untuk memfasilitasi hal tersebut.

2. Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu

Realisasi kinerja tahun 2022 dan 2023 dibandingkan dapat dilihat pada grafik berikut:

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | REALISASI | |
|-----|---|---|--------|-------|-----------|-------|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun | Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun | 80,2 | 80,25 | 80,83 | 87,69 |
| 2 | Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% |

1. Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun



2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti



3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target akhir Renstra 2019-2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra Bakorwil I Madiun tahun 2019-2024 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun



Berdasarkan tabel tersebut, maka perbandingan realisasi nilai SAKIP Bakorwil I Madiun tahun 2023 sebesar **87,69** dengan target akhir Renstra Tahun 2019-2024 sebesar **80,3**, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2023 dengan target tahun akhir Renstra sebesar **109,20%**.

2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti



Berdasarkan tabel tersebut, maka perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar **100%** dengan target akhir Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 sebesar **100%**, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2023 dalam menjalankan tugas koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan pada kabupaten/kota se-wilayah Bakorwil I Madiun mengalami tingkat kemajuan hingga tahun akhir Renstra sebesar **100%**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan tercermin dari capaian indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator Kinerja Bakorwil I Madiun Tahun 2023 adalah persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti, dengan target 100%. Dari target tersebut realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan atau sub kegiatan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti baik oleh Bakorwil I Madiun atau oleh perangkat daerah terkait.

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengetahui **keberhasilan** Bakorwil I Madiun dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2023 antara lain yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal dari dalam organisasi menjadi penentu atas keberhasilan Bakorwil I Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi :

- a. Jumlah dan kualitas SDM yang memadai,
- b. Sarana dan prasarana penunjang yang semakin memadai,
- c. Tugas pokok dan fungsi yang jelas,
- d. Komitmen, komunikasi dan kerjasama yang baik,
- e. Capaian realisasi penyerapan anggaran yang cukup tinggi (96,00%),
- f. Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan program kegiatan prioritas perangkat daerah,
- g. Sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja jelas dan terukur.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dari luar organisasi yang ikut andil atas keberhasilan Bakorwil I Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

- a. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur,
- b. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder yang baik,
- c. Pengakuan dan peran Bakorwil yang dibutuhkan oleh pihak terkait,
- d. Adanya pembinaan secara langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
- e. Program kegiatan yang dilaksanakan sinergis dengan program kegiatan pemerintah kabupaten/kota atau OPD kabupaten/kota,
- f. Manfaat program kegiatan dapat dirasakan oleh daerah atau OPD terkait dan masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Aspek Manajemen: sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
- Aspek Sumber Daya Manusia: Keterbatasan jumlah SDM terkait dan kompetensi SDM yang belum seimbang dengan jumlah pegawai, hal ini yang tentunya bisa menjadi kendala. Selama ini mengoptimalkan SDM yang ada dan mengikutkan/mengirim pegawai pelatihan baik formal maupun non formal.
- Perlunya dukungan anggaran yang proporsional untuk melaksanakan program dan kegiatan baik rutin maupun pembangunan serta tugas-

tugas dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Provinsi di wilayah kerja Bakorwil I Madiun.

- Aspek Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga sering mengalami gangguan, pemeliharaan sarana dan prasarana menyebabkan beberapa tugas kedinasan ada yang belum optimal, sehingga kedepan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana maupun pemeliharannya perlu ditingkatkan.
- Aspek Program, Kegiatan dan Penganggaran: Bakorwil I Madiun didukung oleh 2 program dengan 7 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran | % Capaian Kinerja | % Serapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|--|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun | Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun | 109,27% | 95,8% | 4,2% |
| 2. | Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti | 100% | 98,05% | 1,95% |

Alokasi per sasaran pembangunan dibanding dengan jumlah belanja langsung tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Anggaran | % Anggaran |
|-----|--|---|------------------|------------|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun | Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun | Rp 3.384.072.000 | 69,29% |
| 2. | Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti | Rp 1.500.000.000 | 30,71% |

PAPBD Bakorwil I Madiun Tahun 2023 sebesar Rp 17.316.476.000, dengan komposisi belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 12.432.404.000 dan belanja program sebesar Rp 4.884.072.000. Untuk sasaran strategis pertama ditunjang dengan 1 (satu) program, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 3.384.072.000 (69,29%). Sedangkan untuk sasaran kedua ditunjang 1 (satu) program, Program Pelayanan Penghubung dengan anggaran Rp 1.500.000.000 (30,71%).

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| Sasaran/ Program | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | |
|---|-------------------------------|---------|-----------|---------|---------------|----------------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian |
| Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun | Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun | 80,3 | 87,69 | 109,27% | 3.384.072.000 | 3.365.900.568 | 99,46% |
| Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|---------------|---------------|--------|
| Sasaran: | | | | | | | |
| Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 1.500.000.000 | 1.470.795.901 | 98,05% |
| Program: Program Pelayanan Penghubung | | | | | | | |

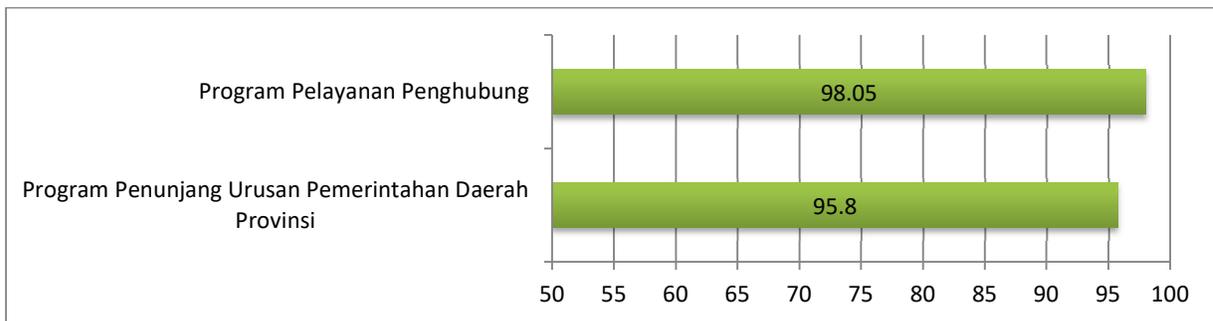
B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan atas pelaksanaan program dan kegiatan Bakorwil I Madiun tahun 2023 berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

Adapun alokasi anggaran Bakorwil I Madiun tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Program, Kegiatan, Pagu, dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

| NO | PROGRAM | PAGU | REALISASI | % |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 15.816.476.000 | 15.152.316.590 | 95,80 |
| 2 | Program Pelayanan Penghubung | 1.500.000.000 | 1.470.795.901 | 98,05 |
| | JUMLAH | 17.316.476.000 | 16.623.112.491 | 96,00 |



C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 20 November 2023, Nomor: 000.8/6/3/44242/031.2/2023 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bakorwil I Madiun Tahun 2023, berikut upaya-upaya yang telah dan sedang kami lakukan:

1. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik melalui perubahan Budaya Kinerja, kami selalu melaksanakan koordinasi untuk keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan antar bidang maupun dengan perangkat daerah lain yang terkait;
2. Secara bertahap, kami telah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masing-masing ASN agar dalam penyusunan SKP diselaraskan dengan perjanjian kinerja yang telah disusun dan merupakan hasil breakdown perjanjian kinerja atasan langsung dan kinerja organisasi secara umum;
3. Bakorwil I Madiun selalu melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dengan cara mengusulkan formasi tambahan ASN kepada BKD Provinsi Jawa Timur, mengingat dari segi jumlah ASN masih kurang ideal, dan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan internal bagi ASN Bakorwil I Madiun seperti penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja, penyusunan SKP, dan pengelolaan tata naskah dinas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Bakorwil I Madiun Tahun 2023 ini telah menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Bakorwil I Madiun pada tahun anggaran 2023. Laporan ini merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran, bahwa pencapaian kinerja Bakorwil I Madiun pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun

Indikator : Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun (**capaian 109,27%**)

Sasaran 2: Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun

Indikator : Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti (**capaian 100%**)

3. Capaian realisasi anggaran Bakorwil I Madiun tahun 2023 sebesar **96,34%**

B. Langkah yang akan dilakukan

1. Bakorwil I Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupaya meningkatkan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, kerjasama dan monitoring serta evaluasi dengan stakeholder terkait dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar kinerjanya dapat meningkat;

2. Optimalisasi mekanisme manajemen internal Bakorwil I Madiun agar tertib administrasi sesuai dengan ketentuan atas penyusunan dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan program dan kegiatan serta dokumen pelaporan maupun evaluasi;
3. Berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM Bakorwil I Madiun agar memiliki kompetensi yang memadai.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Form Pendanaan Indikatif Renstra 2019-2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Rekapitulasi Data
4. Cascading Kinerja
5. Peta Proses Bisnis